

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Tingginya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia, terutama sepeda motor, berdampak pada kualitas lingkungan, salah satunya melalui knalpot bising. Peraturan seperti UU LLAJ, Permen LHK No. P.56/2019, dan Perda Sleman No. 10/2021 menjadi dasar hukum pengendalian kebisingan. Standar kebisingan berdasarkan kapasitas mesin diatur secara rinci, dan pelanggaran dapat dikenai sanksi pidana. Untuk mendukung efektivitas penegakan, penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada knalpot aftermarket menjadi penting. SNI memberikan kepastian hukum, melindungi masyarakat, serta mendukung industri lokal. Upaya ini sejalan dengan prinsip good governance dan bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan sehat.

Pemerintah Kabupaten Sleman menjalankan perannya dalam menanggulangi knalpot bising melalui Perda Nomor 10 Tahun 2021, yang memberi dasar hukum bagi pengujian kendaraan bermotor sesuai standar teknis. Namun, pengujian hanya difokuskan pada KBWU seperti mobil angkutan dan bus, sementara kendaraan pribadi dan sepeda motor yang sering melanggar tergolong Non-KBWU dan tidak menjadi prioritas. Hal ini menimbulkan tantangan dalam pengawasan. Meskipun Dinas Perhubungan memiliki kewenangan dan fasilitas pengujian, pelaksanaan di

lapangan masih terbatas dan lebih bersifat edukatif. Oleh karena itu, revisi Perda diperlukan agar pengawasan mencakup semua kendaraan demi lingkungan yang tertib dan nyaman.

Pemerintah Daerah Sleman, melalui Dinas Perhubungan dan kepolisian, berkolaborasi dalam penegakan hukum terkait penggunaan knalpot bising. Namun, penegakan ini masih terbatas, dengan Dinas Perhubungan berperan sebagai pengatur lalu lintas dan penertiban kendaraan angkutan jalan. Penindakan knalpot bising diserahkan kepada kepolisian, yang memiliki kewenangan lebih luas. Meskipun ada dasar hukum dalam UU LLAJ dan peraturan terkait, implementasi di lapangan masih kurang optimal, terutama dalam penggunaan alat pengukur kebisingan. Penegakan hukum perlu ditingkatkan untuk menciptakan ketertiban dan melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang sehat.

B. Saran

Untuk mengatasi dampak negatif dari knalpot bising akibat tingginya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia adalah dengan memperkuat penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada knalpot aftermarket. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi kepada produsen dan konsumen mengenai pentingnya mematuhi standar kebisingan yang ditetapkan. Selain itu, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari pihak berwenang dalam menegakkan peraturan yang ada, termasuk sanksi bagi pelanggar. Kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat juga

harus ditingkatkan untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih tertib dan sehat.

Guna meningkatkan efektivitas penanggulangan knalpot bising di Kabupaten Sleman adalah melakukan revisi terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2021 agar pengujian kendaraan bermotor tidak hanya terbatas pada kendaraan bermotor yang tergolong KBWU, tetapi juga mencakup kendaraan pribadi dan sepeda motor. Dengan memperluas cakupan pengujian, Dinas Perhubungan dapat lebih efektif dalam mengawasi dan menindak pelanggaran kebisingan. Selain itu, perlu adanya peningkatan fasilitas dan sumber daya untuk pengujian, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggar. Langkah-langkah ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat.

Untuk meningkatkan penegakan hukum terkait penggunaan knalpot bising di Kabupaten Sleman adalah dengan memperkuat kolaborasi antara Dinas Perhubungan dan kepolisian melalui pelatihan bersama dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, perlu dilakukan pengadaan dan pemeliharaan alat pengukur kebisingan yang memadai untuk memastikan penindakan yang akurat dan efektif. Dinas Perhubungan juga sebaiknya memperluas perannya dalam pengawasan kendaraan pribadi, bukan hanya kendaraan angkutan jalan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum dapat lebih optimal, menciptakan ketertiban, dan melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang sehat.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Acip Setiawan, 2007, *Sohor Jadi Modifikasi Motor*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Agus Saputra dan Suhendry, 2025, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara*, PT. Adab Indonesia, Indramayu.
- Arinto Y.P. Wardoyo, 2016, *Emisi Partikulat Kendaraan Bermotor dan Dampak Kesehatan*, Universitas Brawijaya Press, Malang.
- Henry S. Siswosoediro, 2009, *Buku Pintar Mengurus Surat & Dokumen Kendaraan Bermotor*, Visimedia, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie dan Hafid Abbas, 2015, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Joeniarto, 1992, *Perembangan Pemerintahan Lokal*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muhammad Solikhudin, 2022, *Good Governance (mengurai penyelenggaraan negara yang bersih dengan pendekatan maqasid al-shariah)*, Cv. Bintang semesta media, Sleman.
- Nurul Qamar, dkk. 2018, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan*, Cv. Social Politic Genius, Makassar.
- Setiaji, Mukhamad Luthfan, Ibrahim, Aminulah, 2017, *Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif*, Lex Scientia Law Review. Volume 1 No. 1, November, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Sri Pudyatmoko Y, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Yogyakarta.
- Titin Rohayatin, 2023, *Teori Pemerintahan*, Deepublish Digital, Sleman.

TESIS/DISERTASI

- Damas Reza Kurniadi, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan Knalpot Racing Oleh Kepolisian Resor Magelang Kota*, Disertasi, Universitas Negeri Semarang.
- Jecklin M Dhewana, 2021, *Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Pribadi Di Wilayah Kota Pekanbaru*, Disertasi, Universitas Islam Riau.
- Saiful Hatta, 2022, *Penegakan Hukum Terhadap Motor (Knalpot Bising) Oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh*, Disertasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

JURNAL

- Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal AL-AZHAR Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol . 2, No. 3, Maret 2014.
- Jeremia Marcelino Lambonan, Marthin Lambonan, Fonny Tawas, 2024, "Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Kendaraan Bermotor Yang Mencemari Lingkungan Dan Mengakibatkan Polusi Udara Menurut Undang-Undang

- Nomor 32 Tahun 2009”, *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. 12 No. 5 Nov 2024, Universitas Sam Ratulangi
- Luky Abdul Majid, dkk. 2023, “Penerapan Sanksi Tambahan terhadap Pengguna Knalpot Non-Standar dalam Undang-Undang Lalu Lintas”, *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Volume 8 No 2, Juli-Desember 2023, Universitas Buana Perjuangan
- Rima Oktaviani Fanidia, dkk. 2024, “Implementasi Sanksi Hukum Bagi Pengguna Modifikasi Motor Knalpot Racing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Perspektif Fiqh Siyasah”, *Journal of Sharia and Legal Science*, Vol. 2 No. 2 August 2024, 282-299, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
- R. Tony Prayogo, , 2016, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang “, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

SURAT KABAR

- Monica Ayu Caesar Isabela, 2022, “Urusan Pemerintahan Konkuren”, *Harian Kompas*, tanggal 20 April 2022, Jakarta
- Lugas Subarkah, 2022, "Ratusan Knalpot Blombongan Hasil Razia Polisi Dihancurkan", *Harian Jogja*, tanggal 27 April 2022, Sleman.

INTERNET

- Badan Pusat Statistik*, Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Provinsi dan Jenis Kendaraan (unit), 2023, hlm.1 <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VjJ3NGRGA3dkRk5MTIU1bVNFOTVVbmQyVURSTVFUMDkjMw==/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-provinsi-dan-jenis-kendaraan--unit---2023.html>, diakses 19 Maret 2025.
- Humas BSN*, Pentingnya SNI Sebagai Acuan dalam Metodologi Analisis Sensori, hlm.1 <https://bsn.go.id/main/berita/detail/19331/pentingnya-sni-sebagai-acuan-dalam-metodologi-analisis-sensori>, diakses 25 November 2024.
- Humas BSN*, Dukung Keberlanjutan Industri, BSN Siap Rumuskan SNI Knalpot Aftermarket, hlm.1 <https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/19193/dukung-keberlanjutan-industri-bsn-siap-rumuskan-sni-knalpot-aftermarket>, diakses 25 november 2024.
- Humas Polrestabengkulu*, Sambangi Penjual Knalpot, Sat Lantas Polresta Bengkulu Sosialisasi dan Memberikan Imbauan Tentang Penggunaan Knalpot, hlm.1 <https://restabengkulukota.bengkulu.polri.go.id/sambangi-penjual-knalpot-sat-lantas-polresta-bengkulu-sosialisasi-dan-memberikan>

[imbauan-tentang-penggunaan-knalpot%EF%BF%BC/](#), diakses 11 Oktober 2024.

<https://kbbi.web.id/knalpot>

<https://kbbi.web.id/bising>

I Wayan Agus Wisnawa, Fenomena Knalpot Brong di Kalangan Anak Muda, hlm.1 <https://porosinformatif.com/2022/11/14/fenomena-knalpot-brong-di-kalangan-anak-muda/>, diakses 11 Oktober 2024.

Rifat Alhamidi, Rentetan Kasus Kejahatan di Jabar Akibat Pemakaian Knalpot Brong, hlm.1 <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7149990/rentetan-kasus-kejahatan-di-jabar-akibat-pemakaian-knalpot-brong>, diakses 11 Oktober 2024.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor


Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Baku Mutu Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru Dan Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diproduksi Kategori M, Kategori N, Dan Kategori L.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

LAMPIRAN

Gambar 2 Surat izin penelitian kepada satlantas Polresta Sleman



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 356/V/CVD-FH
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

01 November 2024

Kepada
Yth. Korps Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Sleman
Jl. Magelang KM.12,5, Krpyak, Triharjo, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55514

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.


Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin riset/penelitian dan wawancara bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : Reinardus Mario Rosario
2. Nomor Mahasiswa : 210514290
3. Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan
4. Lokasi Riset : Kabupaten Sleman
5. Dosen Pembimbing I : Yustina Niken Sharaningtyas, SH., MH.
Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM PENGGUNAAN KNALPOT BISING
DI KABUPATEN SLEMAN
7. No. Handphone / WA : 082138622587

Perlu kami sampaikan bahwa Riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Dekan I,





FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat
Kampus I Gedung Alfonsus
Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL
<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax. : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id

Sumber: Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Gambar 3 wawancara dengan Kaur Bin ops dan Kasatlantas Polresta Sleman



Sumber: Kamera Penulis

Gambar 4 wawancara dengan Kasi Pengendalian dan Operasional Bidang Lalu Lintas Dishub Sleman, Bob Librianto



Sumber: Kamera Penulis